

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENANGGULANGAN BANJIR SUNGAI CILIWUNG DI
JAKARTA TIMUR***

Tegar Wishnu Atmojo¹

Titin Rohayatin²

Dadang Sufianto³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : wishnutegar@gamil.com

Abstrak

Fokus *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara pemangku kepentingan. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O'Leary dan Bingham (dalam Retno Astuti, 2020:41-42) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian.

Bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, maka penting adanya kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) terutama pada DAS Ciliwung yang kerap menjadi penyebab banjir di DKI Jakarta. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) termasuk ke dalam Pengkajian Resiko Bencana yang terdapat di Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Fungsi dari pengkajian risiko bencana pada tatanan pemerintah, hasil dari pengkajian bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Salah satu contoh nyata dari masalah banjir ini adalah banjir yang terjadi di Sungai Ciliwung, Jakarta Timur. Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai utama yang melintasi ibu kota Indonesia, Jakarta. Karakteristik banjir di wilayah DKI Jakarta sendiri dapat disebabkan karena perbedaan karakteristik fisik Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun karakteristik hujan (Jannah, 2023). Banjir di wilayah aliran sungai ciliwung bukanlah hal yang

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

baru, bahkan telah menjadi langganan tahunan yang menghantui warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai ciliwung.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode penelitian kuantitatif yang lain. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

Kekompakkan dalam penanggulangan bencana banjir di Sungai Ciliwung, Jakarta Timur, terbentuk secara alami tanpa tantangan besar yang menghambat pelaksanaannya. Tidak ada strategi khusus yang dirancang untuk menciptakan kolaborasi ini, karena masyarakat dan paguyuban setempat lebih berperan sebagai pendukung dalam kegiatan gotong royong. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki otoritas dan keahlian dalam pengelolaan alat-alat penanggulangan banjir, menjadi pemimpin utama dalam upaya ini. Kolaborasi berjalan dengan lancar karena masyarakat mempercayakan tugas-tugas teknis dan operasional kepada pemerintah, yang lebih memahami cara menggunakan peralatan dan teknologi dalam menghadapi banjir. Dengan demikian, kekompakkan ini tidak memerlukan pendekatan formal atau strategi khusus, tetapi lebih bergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang sudah dipahami dan diterima bersama.

Kolaborasi dalam penanganan banjir di daerah rawan seperti Sungai Ciliwung, Jakarta Timur, memerlukan tiga aspek kunci: kepercayaan, kebersamaan, dan kekompakkan. Kepercayaan adalah fondasi utama, dibangun dari kesadaran bersama akan pentingnya mengurangi risiko banjir. Dengan kepercayaan, pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, lebih cenderung berbagi informasi dan sumber daya, serta mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.

Kebersamaan dipupuk melalui *sharing information* dan silaturahmi dan pertemuan rutin antar pemangku kepentingan. Pertemuan ini memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan kerjasama yang harmonis, di mana setiap pihak merasa menjadi bagian dari solusi. Kebersamaan meningkatkan solidaritas dan rasa tanggung jawab kolektif, membuat semua pihak lebih termotivasi untuk berkontribusi aktif dalam mitigasi dan penanggulangan banjir.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Banjir, Daerah Aliran Sungai (Das) Ciliwung*

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Abstract

The focus of collaborative governance is on public policy and issues. Public institutions do have a major orientation in policy making, the goal and process of collaboration is to achieve a degree of consensus among stakeholders. Collaborative governance requires the realization of social justice in fulfilling public interests. According to O'Leary and Bingham (in Retno Astuti, 2020:41-42) collaboration is a concept that describes the process of facilitating and implementing involving multiple organizations to solve problems that cannot or are not easily solved by an organization alone.

The flood disaster that occurred in DKI Jakarta can cause enormous losses, so it is important to have a Disaster Risk Reduction (DRR) study, especially in the Ciliwung Watershed which is often the cause of flooding in DKI Jakarta. Disaster Risk Reduction (DRR) is included in the Disaster Risk Assessment contained in the Regulation of the Head of BNPB No. 2 of 2012 concerning General Guidelines for Disaster Risk Assessment. The function of disaster risk assessment in the government system, the results of the disaster assessment are used as a basis for formulating disaster management policies.

One real example of this flood problem is the flood that occurred in the Ciliwung River, East Jakarta. The Ciliwung River is one of the main rivers that crosses the capital city of Indonesia, Jakarta. The characteristics of flooding in the DKI Jakarta area itself can be caused by differences in the physical characteristics of the River Basin Area (DAS) and the characteristics of rain (Jannah, 2023). Flooding in the Ciliwung River basin is not a new thing, in fact it has become an annual subscription that haunts residents who live along the Ciliwung River.

This study uses qualitative research which is a study whose research results are not obtained through statistical procedures or other quantitative research methods. Qualitative research seeks to gain enlightenment, understanding of a phenomenon and extrapolation to the same situation.

The solidarity in dealing with the flood disaster in the Ciliwung River, East Jakarta, was formed naturally without major challenges that hindered its implementation. There is no specific strategy designed to create this collaboration, because the community and local associations play a greater role as supporters in mutual cooperation activities. The government, as the party that has the authority and expertise in managing flood control tools, is the main leader in this effort. Collaboration runs smoothly because the community entrusts technical and operational tasks to the government, which understands better how to use equipment and technology in dealing with floods. Thus, this solidarity does not require a

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

formal approach or special strategy, but rather relies on the roles and responsibilities of each party that are already understood and accepted together.

Collaboration in handling floods in vulnerable areas such as the Ciliwung River, East Jakarta, requires three key aspects: trust, togetherness, and solidarity. Trust is the main foundation, built from a shared awareness of the importance of reducing flood risks. With trust, the parties involved, such as the government, community, and related institutions, are more likely to share information and resources, and support each other to achieve the same goals.

Togetherness is fostered through sharing information and regular meetings and gatherings between stakeholders. These meetings strengthen interpersonal relationships and create a harmonious cooperative environment, where each party feels part of the solution. Togetherness increases solidarity and a sense of collective responsibility, making all parties more motivated to actively contribute to flood mitigation and management.

Keywords: *Collaborative Governance, Flood, Ciliwung River Basin (Das)*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana alam yang cukup tinggi. Hal ini disebakan karena letak geografis negara Indonesia yang dikepung oleh tiga lempeng tektonik dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Lempeng Pasific. Letak geografis tersebutlah menjadikan Indonesia tergolong dalam negara yang rawan bencana alam. Selain itu faktor musim dan cuaca juga menjadi salah satu penyebabnya Indonesia rawan akan bencana alam. Seperti yang kita ketahui, jika memasuki musim penghujan banyak kota-kota besar di Indonesia yang terkena bencana banjir dan banyak pula di daerah daerah pegunungan yang terkena bencana longsor. Dari fenomena bencana yang terjadi bencana banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi pada setiap tahunnya. Diberbagai daerah di Indonesia terutama di kota-kota besar sering terjadi banjir pada setiap tahunnya.

Banjir merupakan permasalahan yang kerap terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Salah satu kota yang rutin terkena banjir adalah DKI Jakarta. Banjir di wilayah DKI Jakarta sudah terjadi pada jaman colonial Belanda menjajah Indonesia, dan DKI Jakarta pada saat itu

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

masih bernama Batavia. Banjir Jakarta terjadi sejak 1621, kemudian disusul banjir 1878, 1918, 1909, 1918, 1923, 1932 yang menggenangi permukiman warga karena meluapnya air dari sungai Ciliwung, Cisadane, Angke.

Banyaknya daerah aliran sungai yang melintas di kota Jakarta menjadikan kota Jakarta sebagai daerah yang rawan terkena bencana banjir. Salah satu sungai yang terkenal sebagai penyumbang bencana banjir di wilayah DKI Jakarta ialah Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. DAS ciliwung merupakan sungai terbesar yang melintasi wilayah DKI Jakarta, terbentang dari hulu yang terletak di kawasan Bogor hingga hilir yang terletak di tepian pantai utara Jakarta. DAS Ciliwung merupakan salah satu sungai utama yang bermuara ke Teluk Jakarta dengan total luas daerah aliran seluas 347 km² dan panjang sungai utama 117 km. Alhasil sungai Ciliwung merupakan sungai yang sangat berpengaruh di DKI Jakarta, apabila ekosistemnya terganggu maka dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.

Estimasi debit banjir sungai Ciliwung 2-tahunan menurut data Nedeco-PBJR (1973) adalah 100 m³ /s dan debit banjir 25- tahunan sebesar 200 m³ /s, dan nampaknya nilai estimasi ini telah berubah sejalan dengan perubahan penggunaan lahan yang telah terjadi dalam tiga dasawarsa terakhir ini. Hal tersebut terjadi akibat banyaknya alih fungsi lahan di kawasan DAS Ciliwung. Dampak perubahan lahan hutan, perkebunan, pertanian ke lahan pemukiman, industry di DAS Ciliwung mengganggu keseimbangan 3 di permukaan lahan.

Dahulu sungai Ciliwung merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Pesona wilayah pesisir sungai yang indah berimplikasi pada pertumbuhan penduduk. Sampai tahun 1960- an, Sungai Ciliwung masih terlihat jernih namun sudah tidak bisa digunakan untuk konsumsi (Lintang, 2023). Lebih lanjut, seiring berjalannya pertumbuhan pembangunan dan penduduk sungai Ciliwung mulai mengalami banyak permasalahan, seperti bantaran sungai menjadi tempat tinggal, limbah pabrik hingga bantaran sungai menjadi tempat pembuangan sampah. Sumber pencemaran sungai DKI ini bukan hanya disebabkan oleh limbah industri saja tetapi juga berasal dari buangan limbah rumah tangga (permukiman). Bahkan

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

buangan limbah manusia yang berupa sampah, air kotor (tinja), deterjen dan sisa minyak andilnya lebih besar bila dibandingkan dengan limbah industri (Susmarkanto, 2002).

Bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, maka penting adanya kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) terutama pada DAS Ciliwung yang kerap menjadi penyebab banjir di DKI Jakarta. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) termasuk ke dalam Pengkajian Resiko Bencana yang terdapat di Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Fungsi dari pengkajian risiko bencana pada tatanan pemerintah, hasil dari pengkajian bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Kebijakan ini nantinya menjadi acuan sebagai penyusunan rencana penanggulangan bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana alam dalam rencana pembangunan. Pada tatanan mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan untuk melakukan aksi pendampingan langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pada tatanan masyarakat umum, pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan untuk menyusun rencana dan jalur evakuasi dan pengambilan keputusan daerah setempat (BNBP, 2012).

Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta berupaya untuk menekan laju banjir dengan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang sedang berjalan ialah normalisasi sungai yang mengalir di wilayah DKI Jakarta. Sungai ciliwung merupakan salah satu dari 11 sungai yang akan di lakukan normalisasi. Normalisasi sungai ciliwung dengan membangun beton turap (Sheet Pile) sepanjang 33 km disisi kanan dan kiri sungai. Pekerjaan normalisasi sungai ciliwung sudah berjalan 16 km, jadi masih ada 17 km yang akan dikerjakan. Tujuan dari normalisasi sungai ialah untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi 35-50 meter.

Dengan demikian kapasitas sungai ciliwung meningkat yang awalnya hanya 200 m³ per detik menjadi 570 m³ per detik. Gagasan untuk normalisasi sungai muncul ketika Jakarta dilanda bencana banjir besar pada tahun 2012, tetapi proyek normalisasi sungai baru jalankan

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

pada tahun 2013 pada saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun proyek normalisasi sungai belum berjalan mulus dikarenakan sulitnya pemerintah dalam pembebasan lahan. Padatnya penduduk yang tinggal dibantaran sungai ciliwung merupakan kendala pemerintah dalam pembebasan lahan.

Oleh karena itu diperlukan penanggulangan yang berbeda dimana bukan hanya melibatkan pemerintah saja, namun penting untuk melibatkan stakeholders lain dalam menangani permasalahan bencana banjir di Jakarta ini yang telah terjadi setiap tahun pada musin penghujan. Dibutuhkan suatu kolaborasi antara pemerintah pada semua level di Kabupaten Jakarta kasi ini dengan melibatkan masyarakat dan pihak swasta atau privat sector untuk menyelesaikan permasalahan ini demi tujuan dan kepentingan Bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode penelitian kuantitatif yang lain. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah penelitian yang dimulai dengan penggunaan kerangka penafsiran teoritis dan asumsi yang mempengaruhi atau membentuk studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Kemudian, menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia dalam kawasannya ataupun peristilahannya.

Penelitian deskriptif menggunakan prosedur pemecahan masalah yang dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya) saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Dengan metode kualitatif deskriptif, peneliti bertujuan mengetahui gambaran faktual, akurat dan

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

sistematis terkait sifat, fakta dan hubungan antar fenomena. Maka, penggunaan metode kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini ditujui untuk mengetahui gambaran faktual, akurat dan sistematis terkait sifat, fakta dan hubungan antar fenomena yang terjadi di lapangan terkait *Collaborative Governance* dalam penanggulangan banjir di Sungai Ciliwung Jakarta Timur.

KERANGKA TEORI

Collaborative Government

Menurut Purwanti dalam Ranggi (2016:203), pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan atau program kebijakan.

Fokus *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara pemangku kepentingan. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O'Leary dan Bingham (dalam Retno Astuti, 2020:41-42) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian.

Menurut Subarsono (dalam Retno, 2022:98), *Collaborative Governance* merupakan sebuah yang didalamnya untuk mengusung kepentingan masing- masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Ansell dan Gash (dalam Noor, 2022:55) proses *collaborative governance* terdiri dari empat tahapan, yaitu :

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal), yaitu tahapan dalam menjalankan dua isu penting yaitu ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh masing- masing stakeholders dan insentive supaya berpartisipasi. Apabila sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders tidak seimbang, maka kerjasama akan dimanipulasi oleh stakeholders yang memiliki sumber daya dan kekuatan banyak. Oleh karena itu jika hal itu terjadi, maka mesti ada komitmen untuk membantu stakeholders yang lemah. Hal lainnya yang juga penting adalah keharusan adanya insentive agar stakeholders yang lemah bisa gigih bergabung untuk kerjasama. Dan terakhir mesti adanya antisipasi terhadap terjadinya konflik di dalam kerjasama sehingga diawal harus dibangun rasa percaya antar satu sama lain.
2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif), Ansell dan Gash menerangkan bahwa sebuah tahapan proses kolaborasi perlunya fungsi jiwa kepemimpinan yang dimiliki para aktor. Karena untuk menjaga stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan sesama aktor dan tidak ada yang dirugikan diantara aktor, dan memfasilitasi forum diskusi. Kepemimpinan fasilitatif memegang peranan penting dalam proses collaborative governance, urgensinya adalah untuk membawa stakeholders bersama-sama dan membuat semua aktor terlibat dalam program satu sama lain dalam semangat kolaborasi.
3. *Institutional Design* (Desain Institusional), mengacu pada aturan dasar yang mengatur collaborative governance yang jelas dan konsisten mengaktualisasikan para pemangku kepentingan bahwa prosesnya adil dan terbuka.
4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi), dalam membangun tahapan collaboration yang dibuka dengan forum dialog tatap muka dengan secara berkonsensus, dengan tujuan adanya saling percaya antar aktor dan adanya tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang memberikan kesepahaman bersama. Setelah itu terlaksana maka tujuan akhir dari kolaborasi adalah menemukan titik terang atau solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi.

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

O'Flynn and Wanna (dalam Noor M : 2022) mengemukakan 6 dimensi dari *Collaborative Governance*, yaitu :

1. Mencakup cooperation untuk membangun kebersamaan, meningkatkan konsistensi, dan meluruskan aktivitas antar aktor.
2. Kerjasama bisa juga merupakan sebagai proses negosiasi, yang mencakup suatu persiapan untuk berkompromi dan membuat kesepakatan.
3. Bentuk antisipasi bersama melalui serangkaian aturan terhadap kemungkinan kekeliruan yang akan terjadi.
4. Kerjasama juga bisa merupakan kekuasaan dan paksaan, kemampuan untuk mendorong hasil.
5. Kerjasama mencakup komitmen masa depan dan intesitasnya perencanaan atau persiapan untuk meluruskan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.
6. Kerjasama mencakup keterlibatan, proses pengembangan motivasi internal dan komitmen personal terhadap proyek yang akan dikerjakan.

Peraturan Perundang-undangan

Dalam proses penanggulangan banjir, pemerintah provinsi dan pemerintah kota Jakarta timur memiliki peraturan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh tatakelola dan tataran tanggung jawab masing-masing pemerintah. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan banjir adalah:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021
- b. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2017
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Bencana Banjir dan Tanah Longsor

PEMBAHASAN

Banjir sejatinya merupakan salah satu masalah penting yang sering terjadi di Indonesia, banjir sering kali menjadi ancaman yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Banjir sering sering disebabkan oleh faktor geografis dan perubahan iklim yang ada, meskipun pengaruh dari masyarakat dan lingkungan sekitar banjir juga merupakan faktor pendukung lainnya. Indonesia yang merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan tropis sering kali mengalami proses perubahan cuaca yang signifikan. Hujan merupakan unsur variabel cuaca dan iklim yang peranannya sangat penting di berbagai sektor kehidupan manusia namun termasuk paling sulit untuk diprediksi (Dasanto, 2014) Saat musim hujan tiba khususnya dengan curah hujan yang tinggi, berimplikasi pada meningkatnya debit air yang muncul. Selain curah hujan yang tinggi, faktor lain seperti perubahan tata guna lahan, urbanisasi yang cepat, dan buruknya sistem drainase juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir.

Salah satu contoh nyata dari masalah banjir ini adalah banjir yang terjadi di Sungai Ciliwung, Jakarta Timur. Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai utama yang melintasi ibu kota Indonesia, Jakarta. Karakteristik banjir di wilayah DKI Jakarta sendiri dapat disebabkan karena perbedaan karakteristik fisik Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun karakteristik hujan (Jannah, 2023). Banjir di wilayah aliran sungai ciliwung bukanlah hal yang baru, bahkan telah menjadi langganan tahunan yang menghantui warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai ciliwung.

Lebih lanjut, permasalahan menahun yang terjadi diwilayah sungai ciliwung khususnya pada daerah Jakarta Timur tidaklah bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, namun diperlukan kerja sama lintas instansi. Dengan demikian, kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan masyarakat, sangat penting dalam mengatasi masalah banjir di Sungai Ciliwung. Dengan Adanya kolaborasi yang ada diharapkan mampu mengurangi resiko banjir yang serta memberikan sasaran kebijakan yang tepat guna,

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

khususnya bagi masyarakat di wilayah Jakarta Timur.

Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir di sungai ciliwung

Pemerintah Kota Administratif, yang terletak di DKI Jakarta, merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan dan ancaman bencana alam banjir hamper setiap tahunnya. Bahkan terbaru, wilayah Jakarta Timur terdampak banjir pada awal tahun 2024. Merujuk pada data antara.com, wilayah jalan Raya Mabes Hankam, Kelurahan Bambu Apus, hingga Kecamatan Cipayung terendam banjir pada maret 2024 (antara.com, 2024). Dalam rangka untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif mengingat permasalahan banjir tidaklah menjadi tanggung jawab pemerintah saja.

Kerja sama antara aspek pemerintah memiliki fungsi dan manfaat yang signifikan. Kerja sama dan kolaborasi memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan keahlian guna mencapai tujuan bersama yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks penanggulangan banjir di Sungai Ciliwung, misalnya, kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, serta komunitas lokal dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh dibandingkan upaya yang dilakukan secara terpisah.

Namun demikian, implementasi kerjasama semacam ini juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Perlu adanya koordinasi yang baik antara aspek- aspek yang terlibat guna menghindari konflik terkait dan kesuaian tanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar lembaga. Hal ini berfungsi agar para *stakeholder* terkait tidak saling melempar kepentingan sehingga proses penyusunan strategi dalam menanggulangi banjir menjadi lebih inklusif bagi masyarakat terdampak.

a. Kebersamaan

Berkaca dari aspek-aspek diatas khususnya aspek kebersamaan, dalam temuannya ditemukan bahwa proses penanggulangan ini diprakarsai oleh Lembaga public dan melibatkan

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

aspek swasta yang mana bersama-sama berupaya mengentaskan permasalahan banjir di Jakarta Timur.



Gambar Peta Kerawanan Banjir

Sumber: Dokumentasi

Narasumber, 2024

Lebih lanjut, kebersamaan antar institusi sangat penting dalam penanganan banjir karena banjir adalah bencana yang kompleks dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Dalam implementasinya, yang dibutuhkan dalam *collaborative* ini adalah koordinasi yang efektif antara institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua aspek penanganan bencana dapat ditangani dengan baik. Seperti halnya apa yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah lakukan pada aspek paparan diatas. Kemudian, tanpa koordinasi yang baik, penanganan banjir bisa menjadi tidak efektif dan berpotensi meningkatkan risiko bagi masyarakat.

Lalu, aspek-aspek yang terlibat dalam upaya penanganan banjir sejatinya mencakup berbagai lembaga dan organisasi, mulai dari pemerintah

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

daerah, lembaga penanggulangan bencana, aspek swasta hingga organisasi masyarakat sipil dan relawan. Setiap institusi memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas koordinasi dan pengalokasian sumber daya, sementara lembaga penanggulangan bencana fokus pada penyusunan rencana aksi dan penanganan teknis di lapangan. Semua aspek yang terlibat nantinya harus memiliki rasa saling percaya dalam proses implementasi kebijakannya.

Kebersamaan ini sejatinya diperlukan adalah sebelum, selama, dan setelah terjadinya banjir. Sebelum banjir, institusi perlu bekerja sama untuk melakukan penilaian risiko, menyusun rencana kontingensi, dan melaksanakan simulasi tanggap darurat. Selama banjir, koordinasi diperlukan untuk memastikan evakuasi yang aman dan distribusi bantuan yang efisien. Setelah banjir, kerjasama berlanjut dalam proses pemulihan dan rekonstruksi, memastikan bahwa infrastruktur yang rusak dapat diperbaiki dan masyarakat dapat kembali ke kehidupan normal secepat mungkin. Dengan kerjasama yang kontinu, proses penanganan banjir dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif.

b. Kepercayaan

Berkaca dari penanggulangan banjir maka peran dan tanggung jawab setiap stakeholder dalam kolaborasi ini saling keterkaitan satu sama lainnya. Stakeholder yang terlibat sampai saat ini selalu melaksanakan kegiatan dengan maksimal, contohnya seperti Dinas Sumber Daya Air yang mengupayakan pencegahan terjadinya banjir di DKI Jakarta dengan melakukan kegiatan pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur. Salah satunya dengan kegiatan Pembangunan Waduk, Kali/Sungai dan Saluran. Melalui kegiatan pembangunan seperti ini maka diharapkan air hujan ataupun air kiriman dari daerah tetangga jakarta dapat ditampung maupun dialirkan ke laut. Selain sebagai pencegahan banjir, kegiatan tersebut juga diharapkan penjunjang

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

penyerepan air kedalam tanah agar memperbaiki kualitas air tanah di DKI Jakarta.

Kemudian yang selalu memaksimalkan terkait alat peralatan dalam pelaksanaan penanggulangan maupun evakuasi saat terjadi bencana banjir. Unsur pendukung lainnya yaitu Badan SAR Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi Search and Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.

Lebih lanjut, stakeholder lainnya yaitu BPBD Jaktim yang bertugas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada saat prabencana. Peran dan tanggung jawab masing masing stakeholder dalam kolaborasi ini adalah memastikan dan mengontrol jalannya program penanggulangan banjir di sungai ciliwung Jakarta Timur. Bawa untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan atas tanggung jawab pihak yang terlibat dalam penanggulangan banjir yaitu setiap stakeholder memiliki perannya masing-masing, stakeholder yang terlibat sampai saat ini selalu melaksanakan kegiatan dengan maksimal.

Kepercayaan khususnya dalam aspek *collaborative* penanganan banjir sangat penting dan dapat ditingkatkan melalui beberapa indikator utama seperti kejujuran, pemberian tugas, dan integritas. Kejujuran, sejatinya berperan penting dalam menciptakan rasa saling percaya di antara anggota tim. Ketika setiap anggota bersikap jujur dalam menyampaikan informasi dan dalam interaksi sehari-hari, ini membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama yang efektif. Dalam penanganan banjir, kejujuran berarti melaporkan situasi di lapangan dengan akurat, berbagi data yang benar mengenai perkembangan bencana, dan tidak menyembunyikan informasi penting dari anggota tim lainnya. Dengan adanya kejujuran, tim dapat lebih cepat mengambil keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan yang dapat menghambat upaya

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

penanggulangan bencana.

Lalu pembagian tugas juga merupakan indikator penting dari kepercayaan dalam sebuah tim. Ketika anggota tim diberikan tugas dan tanggung jawab tertentu, ini menunjukkan bahwa mereka dianggap mampu dan dipercaya untuk melaksanakannya dengan baik. Dalam konteks penanganan banjir, pembagian tugas yang jelas dan tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tim. Dengan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota, institusi tidak hanya menunjukkan kepercayaan kepada anggotanya tetapi juga memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan oleh orang yang paling sesuai. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memperkuat rasa saling percaya di antara anggota tim, karena mereka merasa dihargai dan diandalkan dalam kontribusi mereka terhadap upaya kolektif.

Selanjutnya, intergritas adalah faktor kunci lain yang menentukan tingkat kepercayaan dalam tim. Integritas mencerminkan sikap benar atau truthfulness dalam bekerja, di mana setiap anggota tim diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika yang tinggi. Dalam penanganan banjir, integritas berarti menjaga komitmen untuk bertindak sesuai dengan standar profesional dan etis, termasuk dalam penggunaan sumber daya dan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ketika anggota tim memiliki integritas, mereka tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja tetapi juga dari masyarakat yang dilayani. Integritas memastikan bahwa tindakan yang diambil selama penanganan bencana dilakukan dengan niat baik dan transparan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi yang terlibat. Dengan kejujuran, pemberian tugas yang tepat, dan integritas yang tinggi, tim penanganan banjir dapat bekerja lebih harmonis dan efektif dalam menghadapi tantangan bencana.

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

c. Kekompakan

Kekompakan antar institusi merupakan faktor krusial dalam penanganan banjir, karena dapat menentukan keberhasilan dalam mengatasi bencana dan melindungi masyarakat yang terdampak. Sejatinya yang dimaksud dengan kekompakan adalah kemampuan institusi untuk bekerja bersama secara harmonis dan saling mendukung, memastikan bahwa setiap tindakan di lapangan terkoordinasi dengan baik. Kekompakan ini menjadi penting adalah karena tanpa adanya kerjasama yang baik, upaya penanggulangan banjir bisa terhambat oleh miskomunikasi dan tumpang tindih peran, yang pada akhirnya dapat memperlambat respons dan memperburuk dampak banjir.

Kekompakan ini menjadi sangat penting adalah di lapangan, tempat tim dari berbagai instansi harus berkolaborasi dalam mengevakuasi penduduk, mendistribusikan bantuan, dan mengelola sumber daya secara efektif. Cara membangun kekompakan ini adalah dengan memperkuat komunikasi dan saling memahami peran masing-masing, sehingga setiap institusi dapat mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama.

Indikator pertama dari kekompakan antar institusi adalah saling ketergantungan tugas. Ini berarti bahwa setiap institusi menyadari bahwa keberhasilan tugas mereka bergantung pada kolaborasi dengan institusi lain. Dalam penanganan banjir, misalnya, dinas kesehatan membutuhkan informasi dari lembaga penanggulangan bencana untuk menentukan di mana pusat-pusat kesehatan darurat harus didirikan. Dengan saling ketergantungan ini, setiap institusi lebih termotivasi untuk bekerja sama dan memastikan bahwa semua aspek penanganan bencana dikelola dengan baik. Ketergantungan ini menciptakan dorongan alami untuk saling membantu dan memperkuat hubungan kerjasama yang harmonis.

Kemudian, indikator kedua adalah saling ketergantungan hasil, di mana semua anggota tim memahami bahwa hasil yang dicapai bukanlah prestasi individu tetapi

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

keberhasilan bersama. Dalam konteks ini, setiap institusi terlibat dalam mengukur kesuksesan berdasarkan pencapaian kolektif, seperti berapa banyak nyawa yang dapat diselamatkan atau seberapa cepat bantuan dapat disalurkan. Kesadaran akan saling ketergantungan hasil ini mendorong setiap institusi untuk bekerja keras dan saling mendukung, karena mereka mengetahui bahwa keberhasilan bersama bergantung pada kontribusi masing-masing pihak. Ini membantu menghilangkan ego sektoral dan fokus pada tujuan bersama yang lebih besar.

Indikator ketiga adalah komitmen yang tinggi dari setiap anggota tim terhadap tujuan yang ingin dicapai. Komitmen ini terlihat dari dedikasi dan ketekunan dalam menjalankan peran masing-masing, meskipun dihadapkan pada tantangan dan hambatan.

Institusi yang memiliki komitmen tinggi akan lebih mudah mengatasi perbedaan dan beradaptasi dengan perubahan situasi, karena mereka fokus pada pencapaian tujuan akhir, yaitu meminimalkan dampak banjir dan memulihkan kondisi masyarakat secepat mungkin. Dengan komitmen yang kuat, setiap institusi tidak hanya bekerja untuk mencapai target individu tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi pada kesuksesan kolektif. Keberhasilan penanganan banjir sangat bergantung pada komitmen tinggi dan kekompakkan antar institusi ini, karena hanya dengan bekerja bersama secara efektif, dampak bencana dapat diatasi dengan lebih baik.

Kekompakkan dalam penanggulangan bencana banjir di Sungai Ciliwung, Jakarta Timur, terbentuk secara alami tanpa tantangan besar yang menghambat pelaksanaannya. Tidak ada strategi khusus yang dirancang untuk menciptakan kolaborasi ini, karena masyarakat dan paguyuban setempat lebih berperan sebagai pendukung dalam kegiatan gotong royong. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki otoritas dan keahlian dalam pengelolaan alat-alat penanggulangan banjir, menjadi pemimpin utama dalam upaya ini. Kolaborasi berjalan dengan lancar karena

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

masyarakat mempercayakan tugas-tugas teknis dan operasional kepada pemerintah, yang lebih memahami cara menggunakan peralatan dan teknologi dalam menghadapi banjir. Dengan demikian, kekompakan ini tidak memerlukan pendekatan formal atau strategi khusus, tetapi lebih bergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang sudah dipahami dan diterima bersama.

KESIMPULAN

Kolaborasi dalam penanganan banjir di daerah rawan seperti Sungai Ciliwung, Jakarta Timur, memerlukan tiga aspek kunci: kepercayaan, kebersamaan, dan kekompakan. Kepercayaan adalah fondasi utama, dibangun dari kesadaran bersama akan pentingnya mengurangi risiko banjir. Dengan kepercayaan, pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, lebih cenderung berbagi informasi dan sumber daya, serta mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.

Kebersamaan dipupuk melalui *sharing information* dan silaturahmi dan pertemuan rutin antar pemangku kepentingan. Pertemuan ini memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan kerjasama yang harmonis, di mana setiap pihak merasa menjadi bagian dari solusi. Kebersamaan meningkatkan solidaritas dan rasa tanggung jawab kolektif, membuat semua pihak lebih termotivasi untuk berkontribusi aktif dalam mitigasi dan penanggulangan banjir.

Kemudian kekompakan diwujudkan melalui berbagai aspek seperti gotong royong, di mana masyarakat dan pemerintah bekerja sama secara efektif. Meskipun alat utama dikelola pemerintah, peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya ini memastikan koordinasi yang lancar dan efektif. Keberhasilan kolaborasi ini diukur dengan berkurangnya dampak banjir dan tidak adanya korban jiwa. Dengan memperkuat kepercayaan, kebersamaan, dan kekompakan, kolaborasi penanganan banjir menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, melindungi masyarakat dari ancaman banjir.

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Winarna. 2023. *Collaborative Governance Teori & Praktik Dalam Perspektif Kebijakan Pertahanan*. Jawa Barat : CV. Aksara Global Akademia.
- Astuti Retno, Hardi Warsono, Abd. Rachim. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro Press.
- Noor Muhammad, dkk. 2022. *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta : Bildung.
- Purnomo Eko Priyo, dkk. 2018. *Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yitno Puguh. 2017. *Collaborative Governance Sebagai Basis Pengelolaan Public Affairs*. Surakarta : Yuma Pustaka.
- Bila, Aziza, Boni Saputra. 2019. *Collaborative Governance Strategy in Goverment Sector*.
- Jurnal Transformasi Administrasi. Vol.2. No.2. hal 196-210.
- Irawan, Denny. 2017. *Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol.5. hal 1-12.
- Susilowati Retno, dkk. 2022. *Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan*. Indonesian Governance Journal. Vol.05.No.2.
- Subagyo, A. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Garut: CV. Aksara Global Akademia.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Received : 19 Jan 2025

Accepted : 19 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2017

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor